

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PROGRAM INTERNET DESA DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**IRA ANANDA PUTRI
07011181924033**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM
INTERNET DESA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

IRA ANANDA PUTRI

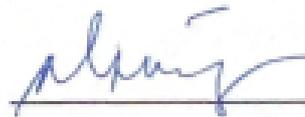
07011181924033

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 09 Oktober 2023

Pembimbing,

Dr. Alamsyah S.IP., M.Si.

NIP. 197808182009121002



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

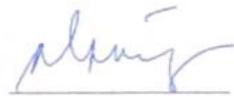
***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM
INTERNET DESA DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 03 November 2023**

TIM PENGUJI SKRIPSI

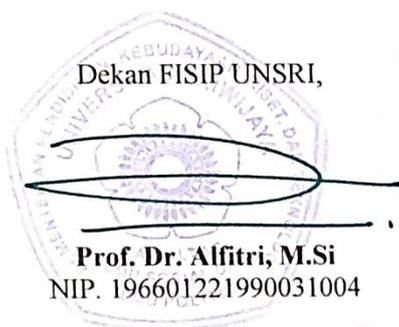
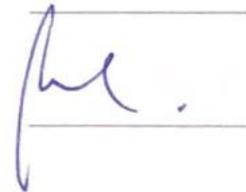
Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP.197808182009121002



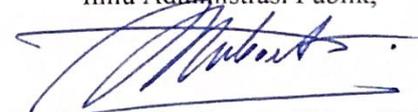
Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP.
NIP.198701052015041003



Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 19760309200802009



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Ananda Putri
NIM : 07011181924033
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Internet Desa Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,
Inderalaya, 09 Oktober 2023



Ira Ananda Putri
NIM.07011181924033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”.

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
Saya Persembahkan Kepada :

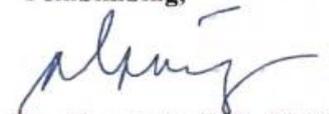
1. Kedua orang tuaku, Ayah Suhaimi Azhari (alm) dan Ibu Winarsih tersayang
2. Saudara dan saudariku Robby, Isnaini, Akbar dan Desi
3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri
4. Teman-teman seperjuangan
5. Almamater saya, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Masih banyaknya *blankspot* atau daerah yang belum terakses internet di Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini berupaya untuk seluruh daerah 3T dapat menikmati akses internet secara merata dengan mencanangkan program Internet Desa. Program internet gratis ini diberikan untuk 17 Kabupaten/Kota di Sumsel termasuk salah satunya Kota Palembang. Tidak hanya internet gratis saja dalam program ini juga menyediakan *website* atau aplikasi sebagai wadah para UMKM untuk mempromosikan usaha mereka, selain itu juga dapat digunakan untuk keperluan pribadi seperti pembuatan surat permohonan/izin. Diskominfo Sumsel selaku penanggungjawab dan Diskominfo Kota Palembang bekerjasama untuk menjalankan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam program internet desa di Kota Palembang yang menggunakan teori Ansell dan Gash (2007). Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data diolah menggunakan *software* NVIVO. Hasil penelitian ini menunjukkan kolaborasi pemerintah dengan melibatkan pihak swasta dalam program internet desa sudah berjalan dengan baik, namun dari masing-masing variabel masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi seperti tidak adanya struktur organisasi yang jelas serta tidak seluruh pihak terlibat secara langsung.

Kata Kunci: *Collaborative Governancen, Governance, Internet Desa*

Pembimbing,


Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002

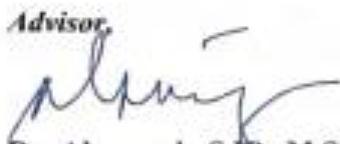
Indralaya, Oktober 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

There is still a vast number of blankspot or non-internet access areas in South Sumatra, the provincial government of southern Sumatra in this case is able to enjoy internet access equally by promoting village internet programs. This free internet program was given to 17 counties/cities in Sumsel as well as to the city of Palembang. Not only is the Internet free of charge in this program but it also provides a website or app for UMKM to promote its business, and it can also be used for personal purposes such as obtaining permits. Dikominfo Sumsel as a responsible and Diskominfo Palembang collaborates to run this program. The study aims to describe an collaborative governance in the village internet program in the city of Palembang that uses the Ansell and Gash theory (2007). The method used is qualitative with a descriptive approach. The data gleaned from this study comes from interviews, observations, and documentation and are processed through NVIVO software. The results show the government's collaboration with the public in the village's Internet programs is working well, but each variable still provides several unmet indicators such as the lack of a clear organizational structure and not all parties are directly involved.

Key Word : Collaborative Governance, Governance, Village Internet

Advisor,

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002

Indralaya, October 2023
Chairman Of The Department Public Adminitrasion
Faculty Of Social and Political Science
Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah member rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Program Internet Desa di Kota Palembang”. Shalawat beriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan, petunjuk, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Alm. Suhaimi Azhari dan Ibu Winarsih serta saudara-saudaraku tersayang Robby Tama Putra, S.E., Muhammad Isnaini, S.E., dan Muhammad Akbar Setiawan atas doa, semangat, dan dukungan yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas semangat serta bimbingannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staf dan karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
9. seluruh staf dan Karyawan ICON+ Kota Palembang.
10. seluruh staf, karyawan, serta warga Kelurahan 1 Ilir Kota Palembang.
11. Sahabat seperjuangan sekaligus partner revisian, Anggi Savitri dan Chairunisa, terima kasih sudah mau membantu dan direpotkan, terima kasih atas semangat, motivasi, serta dukungannya selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
12. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih.

Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari jika skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, semua saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Palembang, 12 Oktober 2023

Ira Ananda Putri
07011181924033

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Governance	13
2.2 Kolaborasi.....	14
2.3 Collaborative Governance.....	15
2.3.1 Definisi Collaborative Governance.....	15
2.3.2 Faktor Penghambat Collaborative Governance	17
2.3.3 Faktor Keberhasilan Collaborative Governance	19
2.3.4 Model Collaborative Governance	20
2.4 Konsep Internet	26
2.5 Internet Desa.....	34
2.5.1 Dasar Hukum	35
2.6 Penelitian Terdahulu	36
2.7 Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42

3.2	Definisi Konsep	42
3.3	Fokus Penelitian.....	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	46
3.5	Informan Penelitian	46
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7	Teknik Analisis Data	48
3.8	Sistematika Penulisan	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1	Kota Palembang	52
4.1.2	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4.1.3	Struktur Organisasi Diskominfo Prov. Sumsel	53
4.2	Hasil Penelitian <i>Collaborative Governance</i> Dalam Program Internet Desa di Kota Palembang	55
4.2.1.	Kondisi Awal	55
4.2.2.	Desain Kelembagaan.....	62
4.2.3.	Kepemimpinan	66
4.2.4.	Proses Kolaborasi.....	68
4.3	Pembahasan	81
BAB V PENUTUP.....		84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2 Fokus Penelitian.....	44
Tabel 3 Informan Penelitian	47
Tabel 4 Ketidakseimbangan Sumber Daya Program Internet Desa	57
Tabel 5 Insentif Kolaborasi Dalam Program Internet Desa	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Presentase Pengakses Internet di Indonesia 2019-2020	3
Grafik 2 Jumlah Presentase Rumah Rangka yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah 2019-2021	5
Grafik 3 Persentase Penduduk 5 tahun Keatas yang Mengakses Internet di Kota Palembang Tahun 2016-2019.....	6
Grafik 4 Jumlah Kelurahan/Desa Panerima Internet Desa Tahun 2019-2022	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008).....	23
Gambar 2 Model Collaborative Governance Rather (2012).....	25
Gambar 3 Visualisasi Data Kondisi Awal.....	61
Gambar 4 Visualisasi Struktur Kelembagaan Program Internet Desa.....	64
Gambar 5 Visualisasi Data Desain Kelembagaan	66
Gambar 6 Visualisasi Data Kepemimpinan	68
Gambar 7 Visualisasi Data Proses Kolaborasi.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Informan	94
Lampiran 3. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	100
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	102
Lampiran 6. SK Dosen Pembimbing Skripsi	103
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi	105
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	106
Lampiran 9. Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	107
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara.....	108

DAFTAR SINGKATAN

BPS: Badan Pusat Statistik

NPM: *New Public Management*

SDGs: *Sustainable Development Goals*

OPA: *Old Public Administration*

Pemprov: Pemerintah Provinsi

Perpres: Peraturan Presiden

Prov: Provinsi

SDM: Sumber Daya Manusia

SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumsel: Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

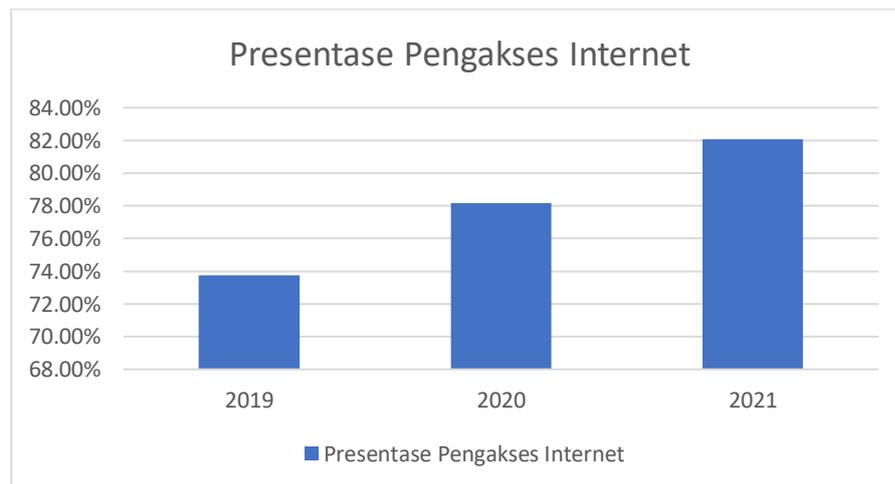
Sustainable Development Goals atau biasa dikenal dengan SDGs yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs atau pembangunan berkelanjutan merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuannya sendiri untuk pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara berkelanjutan, pembangunan yang mengarah pada hubungan manusia yang berkelanjutan, pembangunan yang memperbaiki lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin terselenggaranya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Pada tujuan SDGs yang ke-9 yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat program internet desa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan bidang teknologi komunikasi dan informatika sampai ke pelosok desa agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan target dari tujuan ke-9 SDGs yaitu meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau oleh internet. Pelaksanaan program internet desa di Kota Palembang dalam upaya pencapaian

SDGs melibatkan kolaborasi antar lembaga baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan serta aktor-aktor lainnya.

Istilah *collaborative governance* merupakan metode pengelolaan pemerintahan yang melibatkan aktor non-pemerintah atau negara, yang berfokus pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik. (Ansell dan Gash, 2007). *Collaborative governance* muncul pada era *governance* dalam perkembangan paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration* (OPA) ke paradigma *New Public Management* (NPM). Secara sederhana *governance* dapat dipahami sebagai suatu bentuk perubahan dalam implementasi kebijakan publik yang tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga termasuk aktor lain yang terlibat, seperti sektor publik dan swasta. *Governance* mengkaji tentang pentingnya melibatkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan problem atau masalah yang dihadapi membuat proses pengambilan keputusan dan implementasi menjadi lebih sulit (Dwiyanto, 2018). Fokus *Collaborative Governance* berada pada kebijakan dan masalah publik. Artinya kolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk berkerjasama dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang sedang dihadapi publik, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut melibatkan banyak pihak. Adanya kolaborasi antara pemerintah yang bekerjasama dengan pihak lain diluar pemerintahan, maupun warga negara dapat menciptakan kebijakan atau program-program publik yang lebih baik, sehingga perlunya interaksi saling menguntungkan antar aktor yang terlibat.

Pembangunan jaringan internet semakin meluas di berbagai pelosok setiap tahunnya. Pertumbuhan jaringan ini menyebabkan masyarakat yang mengakses internet di Indonesia semakin bertambah. Penggunaan akses internet yang tinggi diyakini bisa menjadi instrumen untuk pertumbuhan ekonomi satu negara. Melalui internet, banyak peluang yang bisa diciptakan, diinovasikan, penyebaran pengetahuan, peningkatan kemampuan, serta membangun jaringan dan mengelola interaksi sosial di seluruh dunia. Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS), presentase masyarakat Indonesia yang mengakses internet terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 73,75% rumah tangga di Indonesia yang mengakses internet. Lalu pada tahun 2020, terdapat 78,18% yang mengakses internet. Sementara itu, pada tahun 2021 ada sebanyak 82,07% rumah tangga di Indonesia yang mengakses internet.

Grafik 1 Jumlah Presentase Pengakses Internet di Indonesia 2019-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Peningkatan jumlah pengguna dan pemakai internet di Indonesia dipengaruhi pandemi COVID-19, dimana semua kegiatan dilaksanakan secara *online* dengan

menggunakan aplikasi konferensi video untuk sekolah dan pekerjaan, sampai berbelanja dalam jaringan. Tingginya jumlah pengguna dan pemakai internet di Indonesia diharapkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi semakin merata, sebab teknologi digital akan berpengaruh pada industri digital, ekonomi digital, dan sektor lainnya.

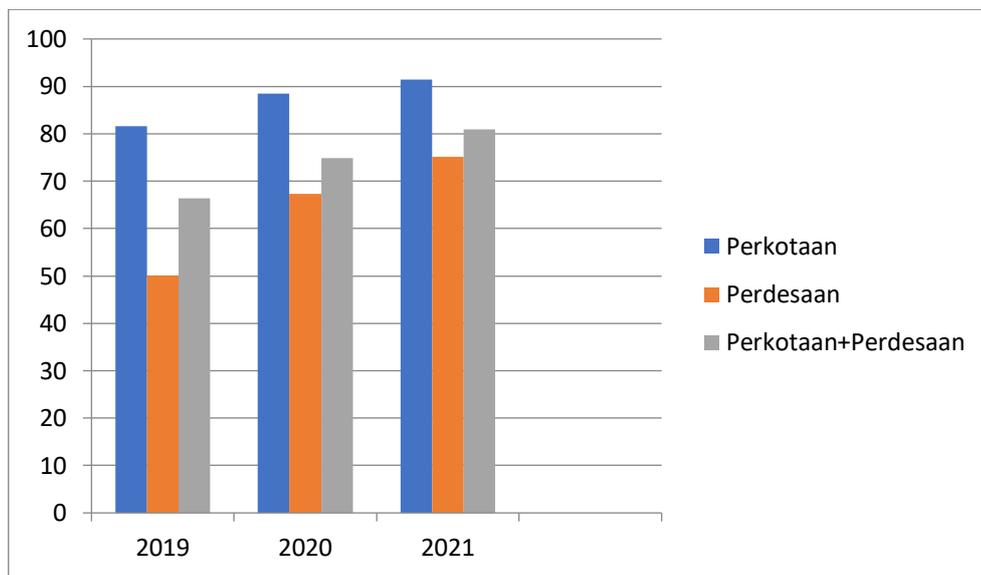
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perpres ini dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, sebagai berikut:

- a. Rencanainduk SPBE nasional,
- b. Arsitektur SPBE,
- c. Peta rencana SPBE,
- d. Rencana dan anggaran SPBE,
- e. Proses bisnis,
- f. Data dan informasi,
- g. Infrastruktur SPBE,
- h. Aplikasi SPBE,
- i. Keamanan SPBE, dan
- j. Layanan SPBE

Salah satu Provinsi di pulau Sumatera yang memanfaatkan teknologi untuk sistem pelayanan serta termasuk kedalam kategori pengguna internet terbanyak

ialah Sumatera Selatan yang berada di urutan kedua setelah Sumatera Utara. Jumlah pengguna internet di Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebanyak 80,95% dengan jumlah di perkotaan sebanyak 91,39% dan perdesaan sebanyak 75,08%.

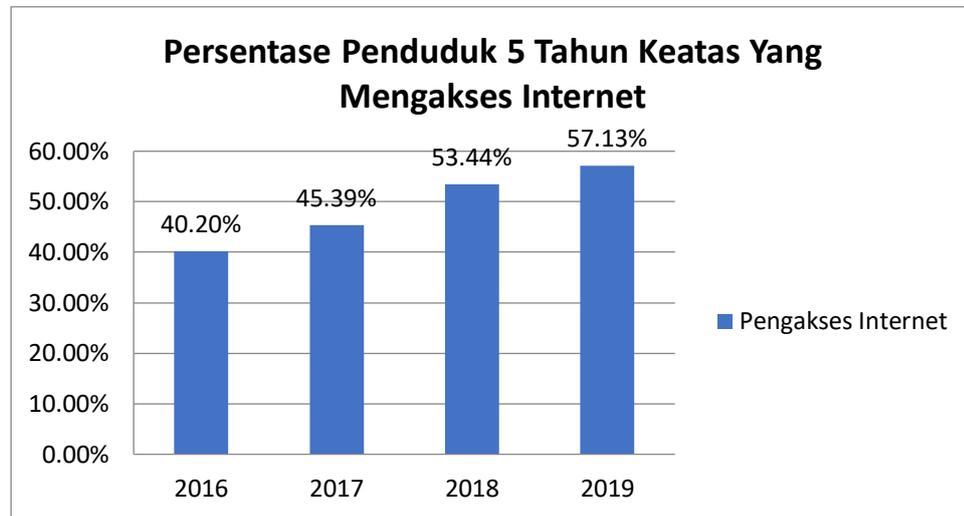
Grafik 2 Jumlah Presentase Rumah Rangka yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.1 menunjukkan presentase pengakses internet yang ada di Sumatera Selatan. Sedangkan untuk Kota Palembang sendiri presentase penduduk 5 tahun keatas yang mengakses internet berdasarkan data terakhir dari BPS tercatat sebanyak 57.13%. Tingginya pengguna internet ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk sistem pemerintahan berbasis elektornik serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, dan transparan serta mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan terpercaya, seluruh instansi pemerintah menggunakan SPBE dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik 3 Persentase Penduduk 5 tahun Keatas yang Mengakses Internet di Kota Palembang Tahun 2016-2019



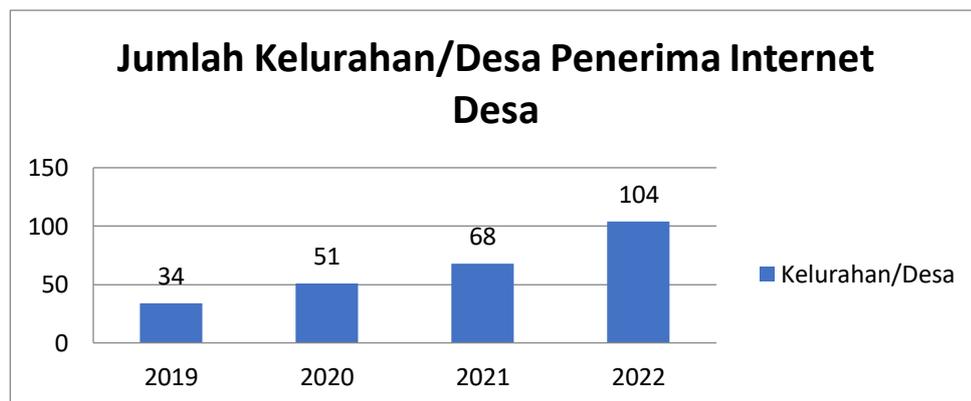
Sumber: Badan Pusat Statistik

Bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menciptakan *e-government* yang berkualitas untuk pelayanan publik yang lebih baik, serta sejalan dengan tujuan dari Perpers ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan program Internet Desa. Program Internet Desa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 607/KPTS/DISKOMINFO/2019 tentang Penunjukkan Desa/Kelurahan Pengelola Internet Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan. Program ini merupakan salah satu cara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Harapan dari program ini dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan melalui pelayanan telekomunikasi berbasis internet yang lebih memumpuni menuju era *Internet of Things* (IoT).

Pada program Internet Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai

penanggung jawab dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang serta untuk pihak swasta bekerjasama dengan PT. ICON+ yang merupakan anak perusahaan dari PLN. Pada program ini setiap desa yang berada di Sumatera Selatan disediakan dua titik *hotspot* atau pancaran akses internet gratis dengan kecepatan internet 5 Mbps setiap bulannya. Tidak hanya memberikan jaringan internet, pemerintah juga memfasilitasi *Website* Desa yang terintegrasi Internet Desa. Sejak disahkannya program ini pada tahun 2019, program Internet Desa pada tahun 2022 sudah tersebar di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik 4 Jumlah Kelurahan/Desa Penerima Internet Desa Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Pada saat ini setiap kecamatan dan desa/kelurahan se-Sumatera Selatan sudah reinstall Internet Desa. Jumlah penerima bantuan Internet Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Desa/kecamatan yang menerima bantuan program Internet Desa atas usulan dari pemerintah daerah setempat untuk terintegrasi dengan Internet Desa agar dapat menikmati akses internet gratis. Untuk desa/kecamatan yang terdaftar sebagai penerima bantuan Internet Desa diharapkan dapat

memanfaatkan jaringan internet semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian desa dan produk unggulan desa melalui *website* desa sehingga dapat bersaing secara internasional.

Mengingat bahwa Kota Palembang tidak memiliki desa melainkan kelurahan, namun program yang dijalankan oleh pemerintah terkait penyediaan internet gratis diberikan untuk 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang. Sangat minim kemungkinan Kota Palembang yang tidak terjangkau internet, tetapi dalam program Internet Desa ini tidak hanya memberikan internet gratis saja, tapi juga menyediakan fasilitas *Website* Desa. Pada *Website* Desa ini para pelaku UMKM dapat menfaatkannya untuk mempromosikan usaha mereka. Sehingga Kota Palembang yang tidak memiliki desa tetapi kelurahan bisa menerima bantuan program ini untuk memajukan UMKM lewat mempromosikan usaha mereka yang nantinya dapat bersaing secara internasional lewat *Website* Desa yang merupakan salah satu fasilitas dari program Internet Desa. Adapun kriteria yang menjadi persyaratan sebagai penerima bantuan ini, khususnya untuk wilayah yang tidak memiliki desa seperti Kota Palembang. Mengingat kota Palembang tidak memiliki desa, hanya ada kecamatan sehingga untuk daerah-daerah penerima bantuan ini di kota Palembang berdasarkan letak lokasi daerah tersebut, seperti daerah yang berada di pinggiran kota atau daerah yang berdekatan dengan sungai musi contohnya daerah 1 Ilir yang bersebelahan langsung dengan sungai musi dan daerah Gandus yang bisa dikatakan berada jauh dari tengah kota.

Permasalahan saat ini yang dialami khususnya untuk di Kota Palembang sendiri ialah keterbatasannya anggaran dalam program Internet Desa. Pada Kota Palembang sendiri program ini baru terdapat di lima Kecamatan. Untuk

Kecamatan Kertapati sendiri yang terdata dua Kelurahan yang menerima bantuan Internet Desa. Sedangkan untuk 4 Kecamatan lainnya baru satu kelurahan yang menerima bantuan Internet Desa di setiap Kecamatan yang terdata. Daerah 3T yang merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi fokus utama pemerintah sebagai penerima bantuan program Internet Desa. Sehingga sebagian besar anggaran pada program ini diutamakan untuk membangun infrastruktur di daerah 3T agar daerah tersebut dapat merasakan jaringan internet yang cepat serta kemudahan dalam mengakses informasi. Oleh sebab itu untuk wilayah Kota termasuk Palembang dalam penerimaan bantuan program Internet Desa dapat dinilai berjalan lambat dan belum merata dikarenakan keterbatasan anggaran dalam program ini.

Kemudian untuk beberapa daerah yang sudah menerima bantuan Internet Desa sering mengalami beberapa masalah jaringan seperti tidak stabilnya jaringan internet dan titik *hotspot* atau pancaran akses internet jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga untuk dapat menggunakan internet gratis masyarakat yang jauh dari titik pancaran akses internet harus datang ke titik akses internet terdekat agar dapat menikmati internet gratis tersebut. Sedangkan beberapa desa/kecamatan yang belum menerima bantuan Internet Desa dikarenakan lokasi kawasan terpencil dengan topografi perbukitan dan perairan yang sulit diakses.

Berdasarkan dari jumlah 3.500 desa/kecamatan yang ada di Sumatera Selatan baru beberapa desa/kelurahan yang teraliri internet. Maka dari itu Pemprov Sumsel bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab program Internet Desa, mengharapkan seluruh desa di Sumatera Selatan dapat terakses dengan jaringan internet gratis. Dalam upaya memenuhi penyediaan akses internet gratis di seluruh desa/kelurahan di Sumatera

Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama dengan berbagai *stakeholders*. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyebaran internet gratis yang merata tersirat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kerjasama ini dikenal dengan *collaborative governance*.

Topik penelitian terkait *collaborative governance* menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, seperti penelitian (Fajrianti et al., 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik dan telah memenuhi keempat indikator dalam kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Penelitian (Putra et al., 2020) juga menunjukkan bahwa *collaborative governance* memberikan dampak positif dalam perekonomian masyarakat. Penelitian (Susniwati & Kurhayadi, 2020) ini juga menunjukkan bahwa proses penanggulangan defisit secara kolaboratif sudah memenuhi unsur kolaboratif. Penelitian (Sudirman et al., 2020a) juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Penelitian (Nurron et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan efektif dan efisien dalam mengurangi biaya riset serta saling melengkapi ketersediaan sumberdaya manusia, keahlian dan infrastruktur. Penelitian (Gunawan & Maruf, 2020) juga menunjukkan hasil yang sama dimana keempat indikator dari proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) telah dijalankan oleh masing-masing stakeholder. Kemudian penelitian (Nilawati, 2022) menguatkan hasil penelitian dengan menandai telah terlaksananya tata kelola kolaboratif berbagai pihak dengan ditunjukkan terwujudnya prinsip

kebersamaan, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama para aktor pada berbagai aktivitas tanggap darurat.

Namun hasil penelitian yang bertentangan atau yang tidak memenuhi kelima indikator dalam *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) serta belum efektif dalam penerapannya, ditemukan pada penelitian (Yahya & Sudarmo, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup efektif. Namun, dari keempat indikator hanya ada satu yang belum terpenuhi yaitu terkait pembagian informasi dalam forum kolaborasi. Penelitian (Girindra et al., 2021) menunjukkan hasil yang sama dimana dalam menggunakan konsep *collaborative governance* belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya partisipasi dan komunikasi antar *stakeholder* serta belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Kemudian penelitian (Napir & Koni, 2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa model *collaborative governance* belum optimal dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten Pohuwato karena eksistensinya belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan informasi dan pembangunan desa.

Hal Ini mengartikan bahwa tata kelola kolaboratif memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tertentu, dan jika *collaborative governance* antara pemerintah dan pemangku kepentingannya baik dan efektif, tujuan akan tercapai dengan sangat baik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang *collaborative governance* dalam program Internet Desa di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: mengapa proses *collaborative governance* dalam program Internet Desa di Kota Palembang berjalan lambat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab proses kolaborasi dalam program Internet Desa di Kota Palembang berjalan lambat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai *Collaborative Governance*.

1.4.2 Manfaat praktis

Sacara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan sumbangsih pemikiran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam praktik kolaborasi antar *stakeholder* pada program Internet Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *Publika : Jurnal Ilmu Administra Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronic Suplly Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin.
- Girindra, I. A. G., Dewi, N. D. U., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Optamalisasi Website Pemerintah Daerah Berbasis Collaborative Governance (Studi Pada Dinas Kota Malang). *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 15–35. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.651>
- Gunawan, A., & Maruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upayah Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*,

8(2), 1–10.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/33502>

Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Pustaka Rumah Cinta.

Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal SOSFILKOM: Sosial, Filsafat, Dan Komunikasi*, 13(1), 33–47. <https://doi.org/doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1456>

Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47–53.

Heryanto, G. G., & Sikumbang, R. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Ghalia Indonesia.

Napir, S., & Koni, Yoslan. K. (2019). Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Desa Online Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(2), 41–50. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.404>

Nilawati, E. (2022). Tata Kelola Kolaboratif Manajemen Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 64–77. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.845>

Nurron, O. M., Nurasa, H., & Halimah, M. (2022). Collaborative Governance Dalam Program Riset Teknologi Kendaraan Listrik. *Journal of Public Sector Innovations*, 6(2), 91–97. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p91-97>

Putra, E., Elsyra, N., & Zaenuri, M. (2020). Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program “Gandeng-Gendong.” *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta*, 6(2), 572–649. <https://doi.org/doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.129>

- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020a). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Neo Soecital*, 5(4), 381–394. <https://doi.org/10.52423/jns.v5i4.14500>
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020b). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Jurnal Neo Societal*, 5(4), 381–394.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susniwati, & Kurhayadi. (2020). Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 349–359. <https://doi.org/doi.org/10.31955/mea.v4i2.429>
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Press.
- Yahya, H., & Sudarmo. (2022). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 239–253. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63278>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang. *CosmoGov*, 5(2), 162–173. <https://doi.org/doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>